



**DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2022

Disampaikan Oleh:

DR. HARI NUR CAHYA MURNI, MSi
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri





OUTLINE



01 LATAR BELAKANG

02 DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENURUNAN STUNTING

03 IDENTIFIKASI DESA LOKUS PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022



LATAR BELAKANG



LATAR BELAKANG

01

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

02

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Sedangkan untuk balita berstatus normal terjadi peningkatan dari 48,6% (2013) menjadi 57,8% (2018). Adapun sisanya mengalami masalah gizi lain.

03

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia.

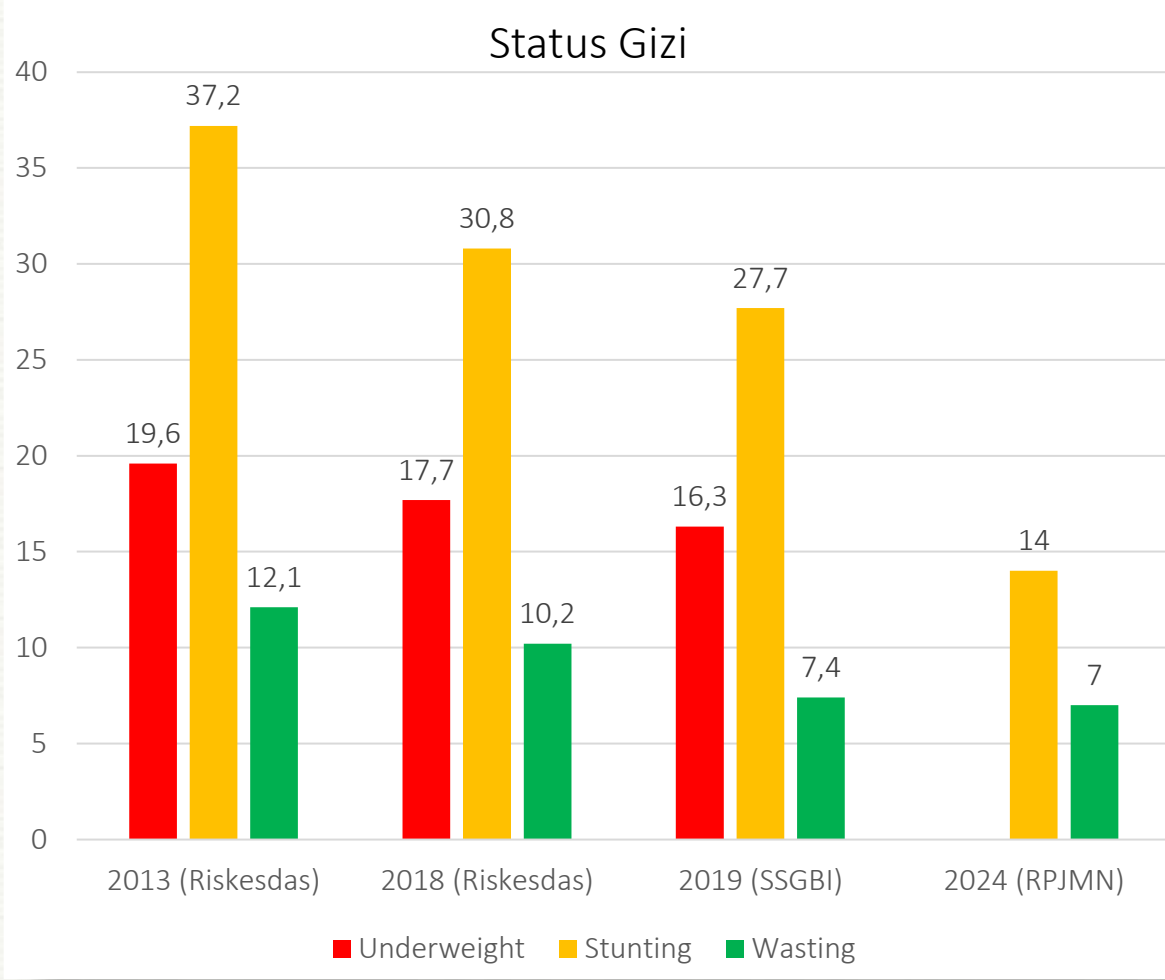
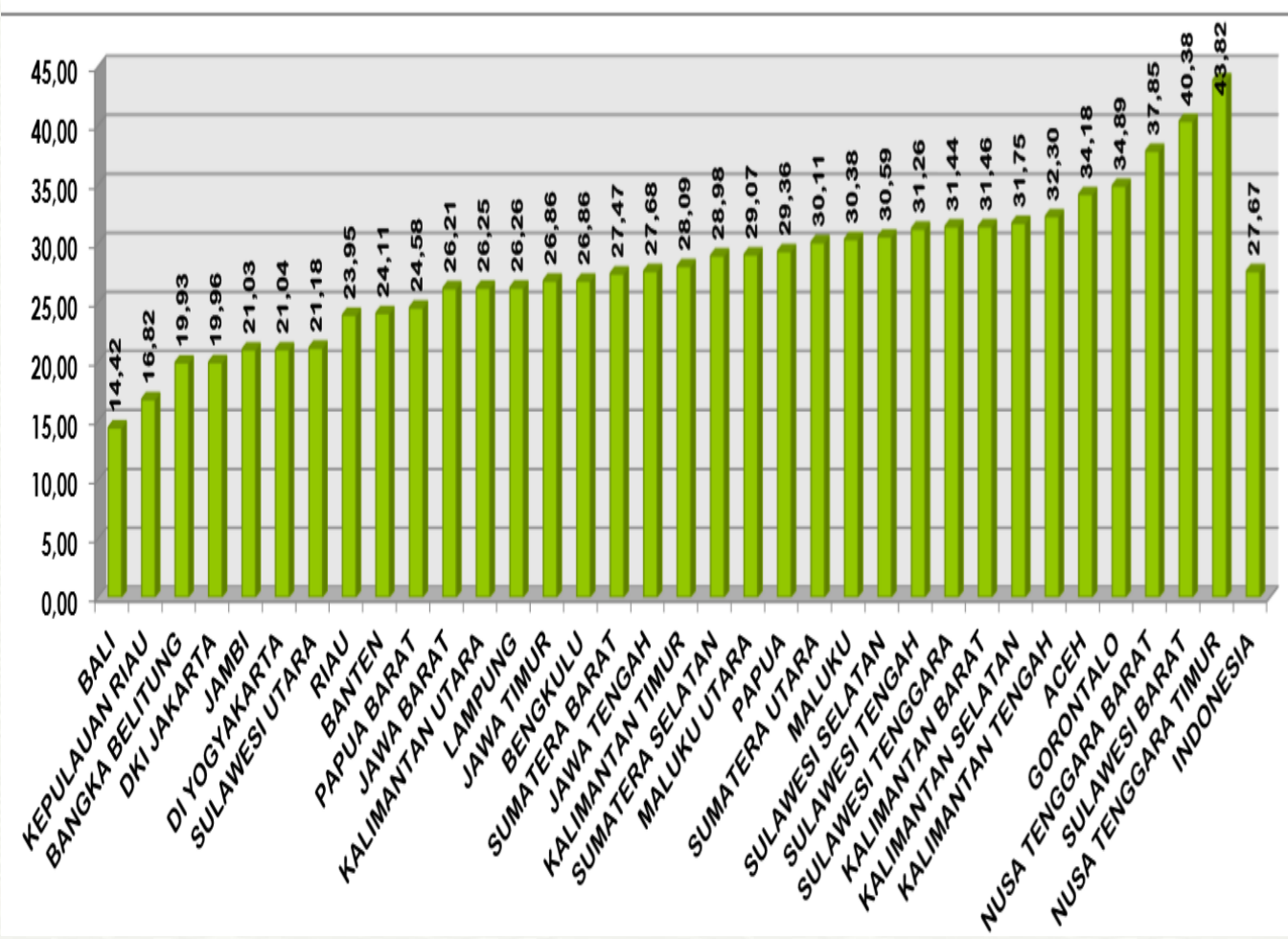
04

Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah usia 2 tahun menjadi 14% dengan Pelibatan Lintas Sektor. Sasaran strategisnya adalah pencegahan dan penurunan stunting adalah Ibu Hamil dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.



PETA PREVALENSI STUNTING NASIONAL TAHUN 2019

(INTEGRASI SSGBI DAN SUSENAS)



Metodologi Perhitungan Data Prevalensi Stunting oleh Kemenkes:

- Target sampel yang dikunjungi 300.000 Rumah Tangga (Ruta) dari 30.000 Blok Sensus (BS) Susenas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Metode PPS (*Probability Propotional to Size*)



PROVINSI DENGAN PREVALENSI STUNTING TINGGI , MENENGAH DAN RENDAH

**Prevalensi Survei
Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)
Tahun 2019**

**27,7% anak Balita
mengalami stunting**

**Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Tinggi**

**NTT, Sulbar, NTB,
Gorontalo, Aceh**

**Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Menengah**

**Jawa Tengah dan
Sumatera Barat**

**Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Rendah**

**Bali, Kep.Riau,
Kep.Babel, DKI.Jakarta,
Jambi**



KENDALA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM STUNTING DI DAERAH

Penyelenggaraan gizi spesifik dan sensitif masih belum terpadu, baik dari proses perencanaan dan penyelenggaraan pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi.

Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai sektor belum memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif.

Pengalokasian dan pemanfaatan sumber-daya dan sumber dana belum efektif dan efisien.

Dalam Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) diidentifikasi kendalanya sebagai berikut :

1

2

3



4

5

6

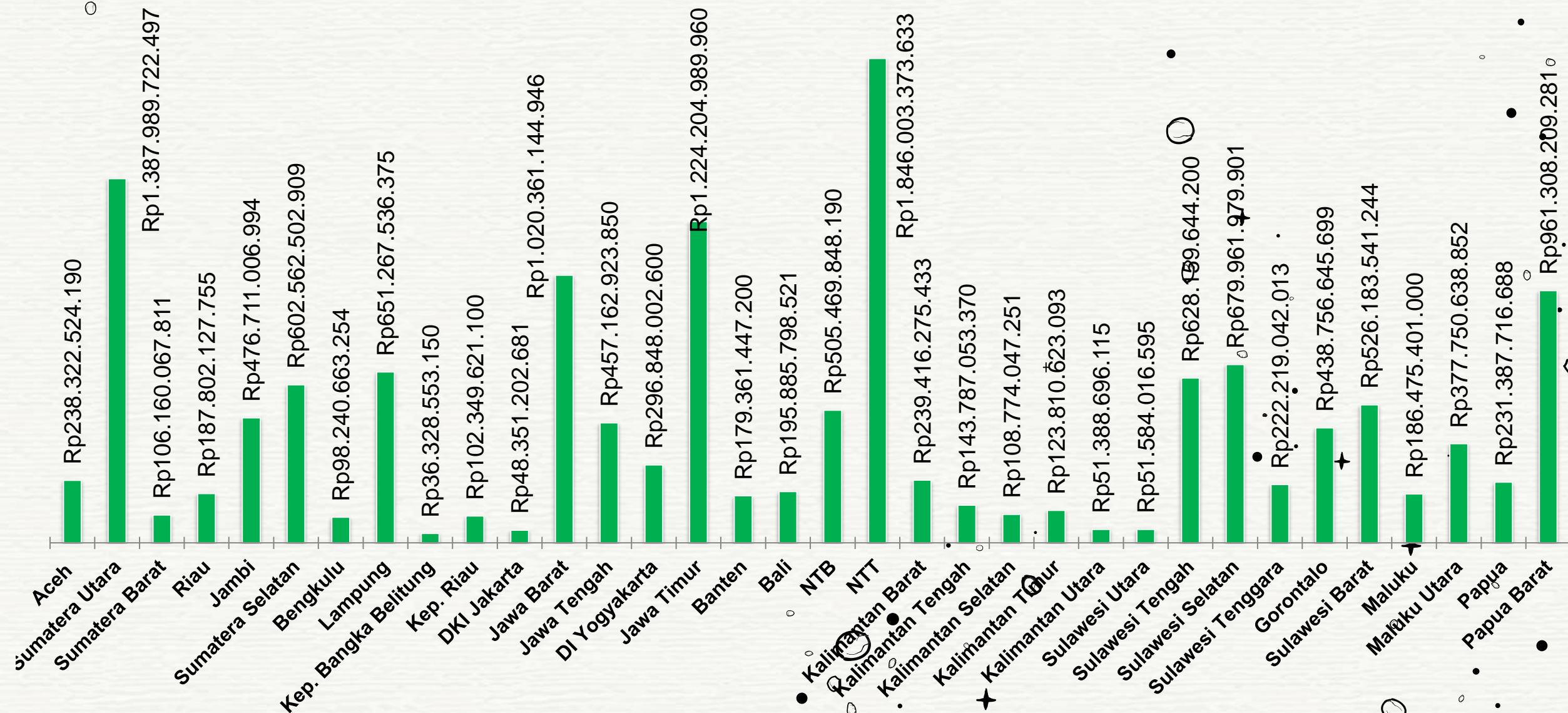
Keterbatasan kapasitas dalam penyelenggara program, ketersediaan kualitas dan pemanfaatan data untuk mengembangkan kebijakan, pogram advokasi, sosialisasi stunting, kegiatan konseling dan keterlibatan masyarakat.

Peningkatan cakupan layanan yang menyasar pada keluarga 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Secara umum konvergensi, koordinasi, konsolidasi program pada berbagai tingkat pemerintahan masih lemah.

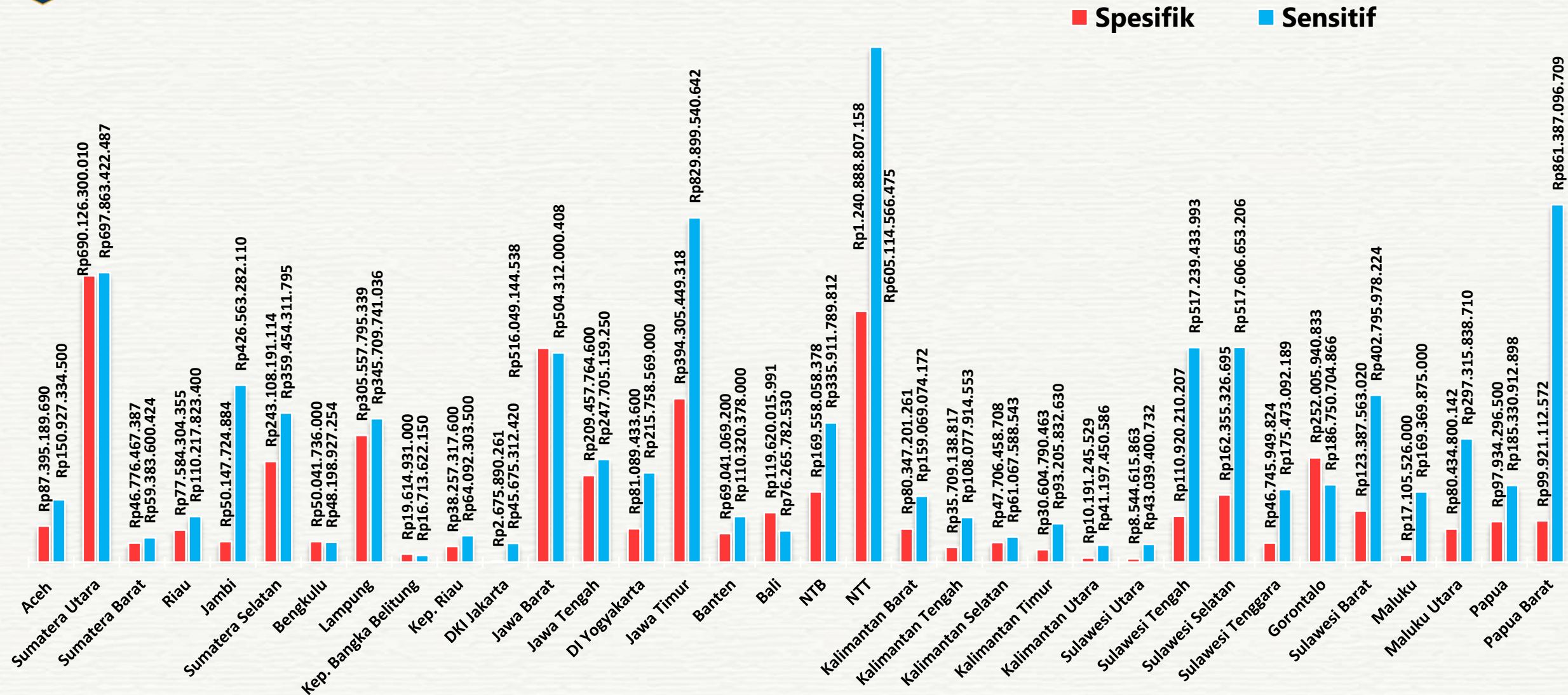


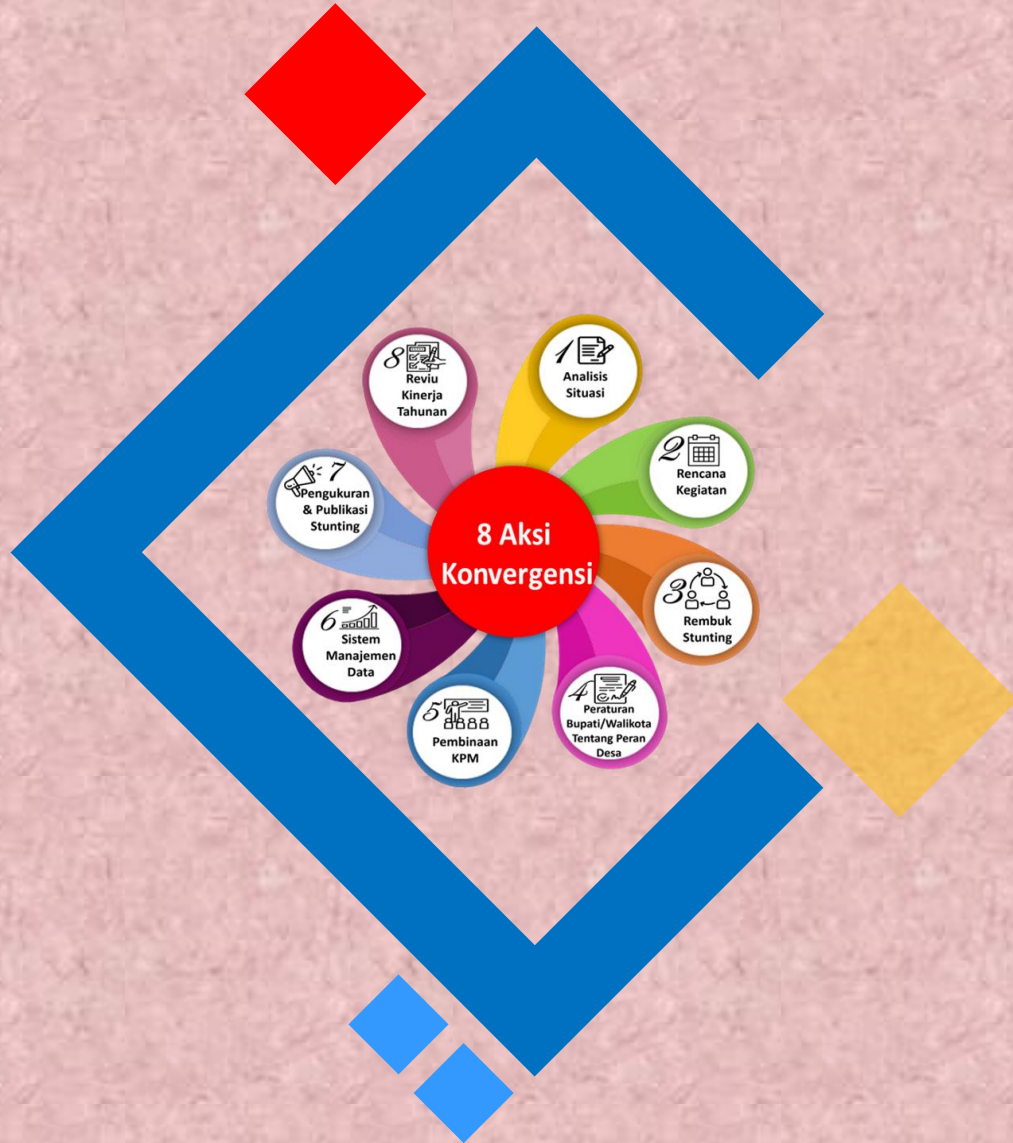
TOTAL ANGGARAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF TAHUN 2021





RINCIAN ANGGARAN INTERVENSI GIZI SPESIFIK & SENSITIF TAHUN 2021





DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING



DUKUNGAN KEMENDAGRI MENGAJAL PROGRAM/KEGIATAN STUNTING DALAM DOKRENDA DAN ANGGARAN DAERAH



Permendagri 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah

✓ **Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah**



Permendagri 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022



Permendagri 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021



PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH

1. Penyelenggaraan bantuan teknis pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan Stunting dan Penilaian Kinerja.

2. Penguatan peran dan fungsi koordinasi pembentukan TKPKD, TIM RAD-PG atau Revitalisasi Pokja

3. Penguatan fungsi perencanaan dan penganggaran daerah melalui harmonisasi RPJMN, RPJMD, RPJMDesa, RKPDDes, Renja PD, RKA-PD dan APBD

4. Penguatan Pemantauan & Evaluasi pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting



SINKRONISASI PEMBANGUNAN

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014

COORDINASI KORTEK



KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN

BAPPENAS

K/L

Sinkronisasi pencapaian prioritas nasional melalui kegiatan K/L, serta target Kementerian untuk mendukung target nasional

Prioritas Nasional K/L

PERAN KEMENDAGRI

Ditjen Bina Bangda Memastikan kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar level pemerintahan

- Sinkronisasi koodifikasi program
- Sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam UU 23/2014
- Sinkronisasi target daerah sesuai kondisi, potensi dan intensitas urusan pemerintahan

KOORDINASI TEKNIS UNTUK Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Nasional

Prioritas Daerah

BAPPENAS

Sinkronisasi usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai APBN dengan kegiatan K/L dan Prioritas nasional

PERAN KEMENDAGRI

KEMENDAGRI

Membahas kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional

Dukungan Kegiatan daerah dari APBD

BAPPENAS

KEMENDAGRI

Sinkronisasi usulan prioritas Daerah dan prioritas K/L

Prioritas Lainnya

K/L

DAERAH

K/L

DAERAH

K/L



DAERAH



FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

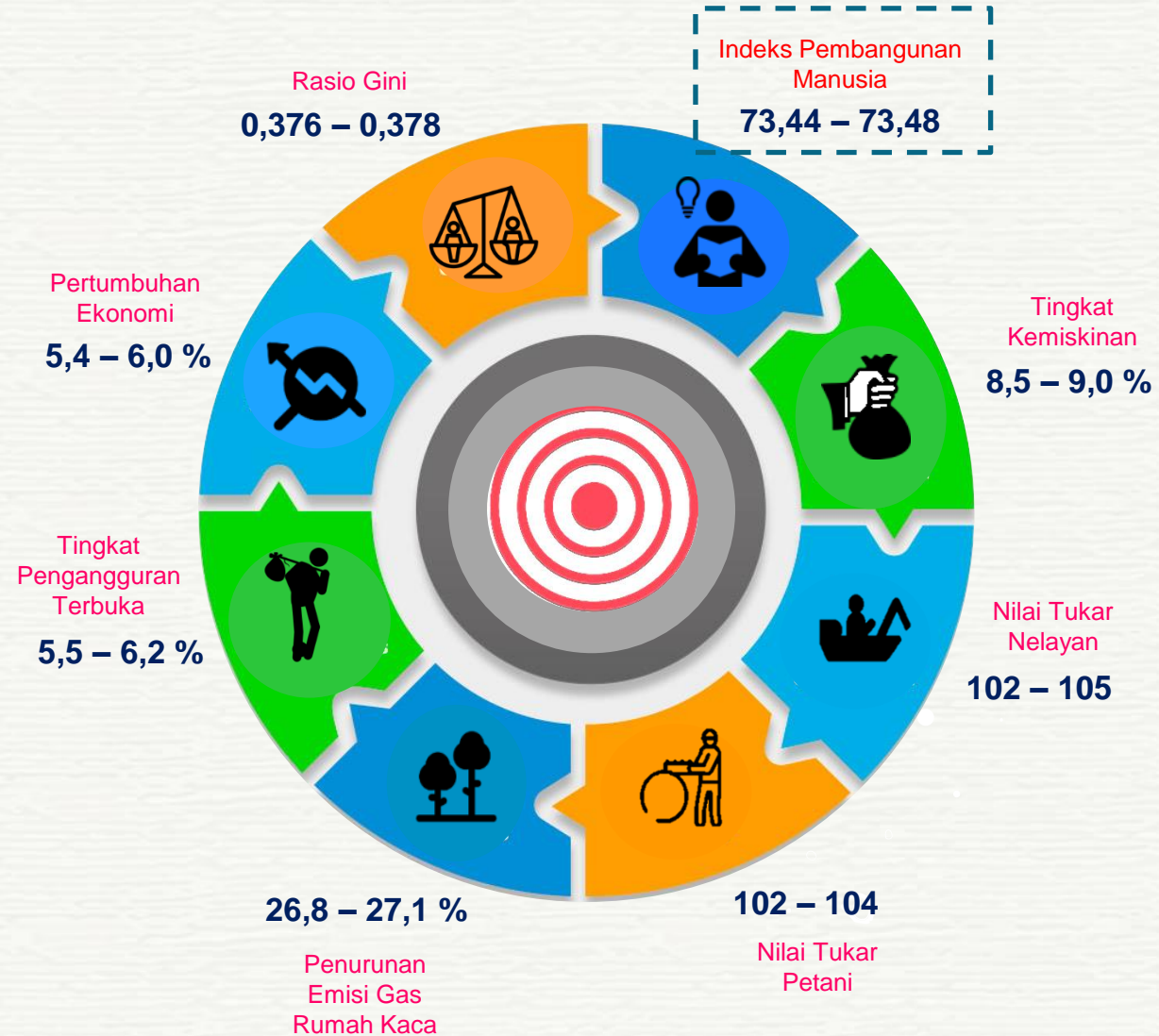
TEMA RKP "PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL"

10 FOKUS PEMBANGUNAN

Jumlah Wisman 8,5-10,5 juta	Pariwisata			Transformasi Digital	Pengguna Internet 79,20%
Pengolahan Non Migas 5,8-6,5%	Industri			Pembangunan Rendah Karbon	Penurunan Emisi GRK 26,87%
Pembangunan Rusun 4.600 unit	Infrastruktur			Perlindungan Sosial	Program Jaminan Sosial 87%
Pertumbuhan Wirausaha 3%	UMKM			Kesehatan	Prevalensi Stunting Balita 18,4%
Pola Pangan Harapan 92,8	Ketahanan Pangan			Pendidikan dan Ketrampilan	Paten Domestik 900



SASARAN PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2022





HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKRENBANG TERKAIT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PER PROVINSI TAHUN 2022

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)

NO	Provinsi	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022	Kesepakatan Rencana Target Daerah
1	Aceh	%	18.4	19	24	20	20 / %
2	Sulawesi Tenggara	%	18.4	18,49	18	17.4	17,4 / %
3	Papua Barat	%	18.4	24.1	23	22	22 / %
4	Jawa Timur	%	18.4	26.26	21,1	18,4	18,4 / %
5	Lampung	%	18.4	26.26	21,1	18,4	18,4 / %
6	Kep. Riau	%	18.4	7.2	20	7	7 / %
7	Papua	%	18.4	19	19	18	18 / %
8	Maluku Utara	%	18.4	12.5	21.1	18.4	18,4 / %
9	Maluku	%	18.4	15	23	22	22 / %
10	Sulawesi Barat	%	18.4		0.35	0.3	26,47 / %
11	Gorontalo	%	18.4	28,4	26	25	22 / %
12	Sulawesi Selatan	%	18.4	30.59	24.59	21.5	21,5 / %
13	Sulawesi Tengah	%	18.4	16.2	15	14	20,56 / %
14	Sulawesi Utara	%	18.4	4,99	4,90	4,85	16,2 / %
15	Kalimantan Utara	%	18.4	18.13	18.18	18.4	17,4 / %
16	Kalimantan Timur	%	18.4	14,7	29,04	28,52	20 / %
17	Kalimantan Selatan	%	18.4	31.75	31	29	22 / %
18	Kalimantan Tengah	%	18.4	32.04	28	24	22 / %
19	Kalimantan Barat	%	18.4	27.3	22	19	19 / %
20	NTT	%	18.4	24.2	20	16	16 / %
21	NTB	%	18.4	23.51	31.49	30.99	30,99 / %
22	Bali	%	18.4	6.1	5.6	5.1	13,5 / %
23	Banten	%	18.4	23.4	23.6	23.6	16,91 / %
24	DIY	%	18.4	10.09	21.8	21.79	13,62 / %
25	Jawa Tengah	%	18.4	14.51	17	16	16 / %
26	Jawa Barat	%	18.4	26.21	23.2	21.2	21,2 / %
27	DKI	%	18.4	19.9	15.9	13.9	13,9 / %
28	Bangka Belitung	%	18.4	4.63	7.3	7.2	7,2 / %
29	Sumatera Selatan	%	18.4	29.8	28	26	21 / %
30	Jambi	%	18.4	21.03	21.1	18.4	16 / %
31	Sumatera Barat	%	18.4	14.3	21.1	18.4	18,4 / %
32	Sumatera Utara	%	18.4	29.2	29.5	28.5	24,8 / %
33	Riau	%	18.4	7.43	22	20	20 / %
34	Bengkulu	%	18.4	8.6	21.1	18.4	17,2 / %



PERMENDAGRI 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205/100.000
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,4%
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,5
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	Insidensi TB per 100.000 penduduk	231/100.000



IDENTIFIKASI DESA LOKUS & CAKUPAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022



DAFTAR IDENTIFIKASI DESA LOKUS PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022

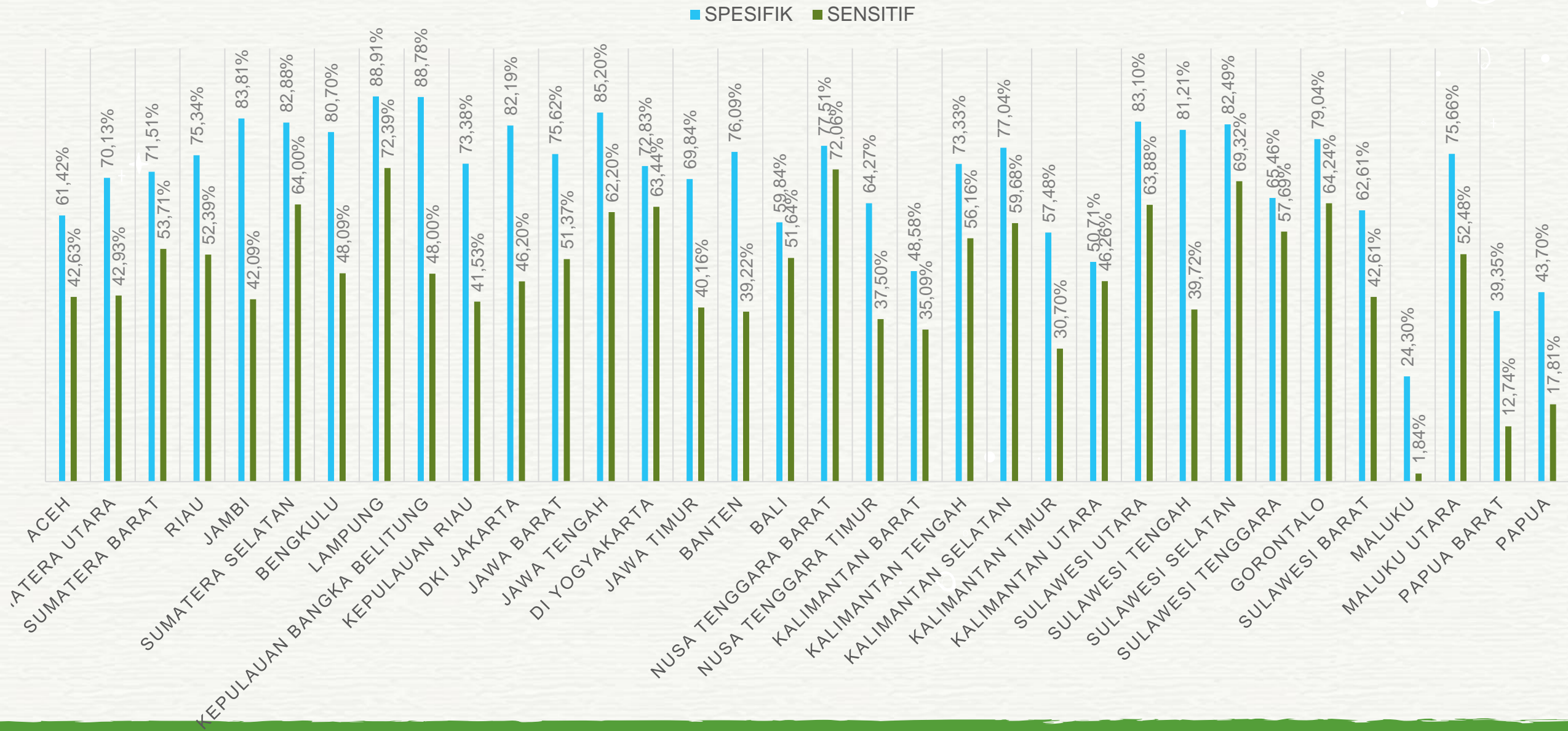
(Sumber Web.Aksi Bangsa Status 21 Mei 2021)





CAKUPAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK TAHUN 2021

(Sumber Web. Aksi Bangsa Status 21 Mei 2021)





TERIMA KASIH